

BAB 1

PENDAHULUAN

Sebagian besar perusahaan di seluruh dunia dimiliki oleh pendirinya atau oleh keluarga, dan mereka berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pekerjaan, dan kemakmuran (La Porta dkk., 1999; Steier, 2007; Zahra dkk., 2004). Berdasarkan temuan Anderson dan Reeb (2003), perusahaan keluarga berperan sebagai pemilik dari suatu perusahaan dalam menjalankan kontrol manajerial atau finansial yang besar. Prioritas dari perusahaan keluarga adalah kesejahteraan keluarganya, untuk itu biasanya perusahaan keluarga memiliki rencana jangka panjang agar perusahaan terus tumbuh dan kesejahteraan keluarga akan terjamin. Anggota keluarga yang bekerja di perusahaan keluarga biasanya memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi karena bekerja di perusahaan sendiri. Hal itu menjadi salah satu keunggulan perusahaan keluarga daripada non-keluarga (Cahyani & Sanjaya, 2017). Namun, terdapat banyak perbedaan lain antara perusahaan keluarga dan perusahaan non-keluarga, sehingga Siebels dan zu Knyphausen-Aufseß (2012) berpendapat bahwa perusahaan keluarga memainkan peran yang dominan di banyak negara. Perbedaan itu mencakup struktur kepemilikan, kinerja perusahaan, pinjaman, dan masih banyak dari berbagai aspek lain.

Menurut Anderson dan Reeb (2003), pendiri perusahaan keluarga atau keturunannya akan terus memiliki kedudukan yang penting seperti mempunyai jabatan pada manajemen puncak, menjadi dewan, atau bisa juga merupakan *blockholder* dalam perusahaan keluarga. Peran keluarga pendiri dan struktur kepemilikan serta penyelarasan insentif mempengaruhi keputusan dan hasil perusahaan dalam perusahaan keluarga (Fan & Leung, 2018). Pemilik perusahaan keluarga biasanya secara aktif terlibat dalam manajemen perusahaan sebagai direktur dan / atau manajer. Karakteristik ini menyiratkan bahwa tidak banyak konflik agensi yang terjadi antara pemilik dan manajer di perusahaan, namun terjadi konflik agensi yang lebih parah

antara pemilik perusahaan keluarga dan pemegang saham minoritas non-keluarga. Tidak hanya itu, perusahaan keluarga juga dipengaruhi oleh ketegangan atau konflik di antara anggota keluarga. Konflik keagenan ini dapat berefek pada operasi, pelaporan keuangan, dan penilaian terhadap perusahaan keluarga (Cheng, 2014). Dalam hal kinerja perusahaan, berdasarkan hasil penelitian Shyu (2011) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga pada perusahaan yang terdaftar di Taiwan berpengaruh positif dengan mempertimbangkan masalah endogenitas. Tetapi, rasio kepemilikan keluarga tidak boleh melebihi 30% agar terhindari dari kinerja yang buruk dan kepemilikan saham keluarga yang berlebihan juga tidak baik untuk perusahaan keluarga di Taiwan.

Thiele dan Wendt (2017) mengungkapkan bahwa perusahaan keluarga memiliki tingkat signifikansi utang keseluruhan dan jangka panjang lebih tinggi dibandingkan dengan non-keluarga berdasarkan sampel 691 perusahaan keluarga swasta dan perusahaan non-keluarga yang ada di Jerman. Hasil pada rasio utang yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pada perusahaan keluarga kemungkinan memiliki akses yang baik ke pendanaan utang. Dengan menggunakan identitas mereka sebagai perusahaan keluarga, bank akan menghargai orientasi jangka panjang dan memberikan peningkatan akses ke hutang kepada perusahaan (Anderson dkk., 2003; Croci dkk., 2011; Zellweger dkk., 2010).

Perusahaan keluarga cenderung menghindari aktivitas yang merugikan bagi perusahaannya karena untuk tetap mempertahankan reputasi perusahaan (Chi dkk., 2019). Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penyajian laporan keuangan yang berkualitas serta menerapkan prinsip konservatisme akuntansi yang merupakan prinsip kehati-hatian (Andreas dkk., 2017). Perusahaan keluarga tidak terburu-buru untuk mengakui keuntungan dan mengecilkan aktiva bersih. Konservatisme akuntansi dapat mengendalikan pembayaran oportunistik kepada manajer dan pihak terkait lainnya dari perusahaan dan kemudian mengurangi kemungkinan litigasi investor terhadap anggota keluarga. Oleh sebab itu, konservatisme akuntansi dapat berguna

untuk mengurangi biaya agensi dan risiko litigasi di perusahaan keluarga (Beaver & Ryan, 2005; Chen dkk., 2014).

Kepemilikan dan kendali keluarga memiliki peran penting dalam perusahaan besar di Asia. Pada kawasan Asia Tenggara, proporsi perusahaan keluarga yang terdaftar yaitu sebesar 68% di Indonesia serta 57% di Thailand dan Malaysia (Claessens dkk., 2000; Jiang & Peng, 2011). Ketiga negara tersebut masih berstatus sebagai negara berkembang berdasarkan data statistik yang diperoleh dari *International Monetary Fund* (IMF). Di negara-negara berkembang kerap terjadi adanya koneksi politik, termasuk salah satunya di Indonesia (Fisman, 2001). Membangun koneksi yang baik dengan pejabat pemerintah dapat menyediakan mekanisme yang berguna bagi perusahaan untuk menghindari ketidakpastian ekonomi. Selain itu, adanya koneksi politik juga dapat mengakibatkan pengadaan pemerintah, lisensi, akses ke keuangan, peluang yang lebih tinggi untuk ditalangi, lebih sedikit pembatasan untuk masuk ke industri yang diatur, dan lain sebagainya (Harymawan dkk., 2019).

Kemudahan akses serta banyaknya manfaat yang dihasilkan dari adanya koneksi politik dapat mengakibatkan meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan (Sulistyowati & Prabowo, 2020). Dalam temuannya, mereka menghubungkan koneksi politik dan profitabilitas dengan teori *stakeholder* yang mana *stakeholder* itu sendiri dipegang oleh instansi pemerintah atau pihak lain yang memiliki ketertarikan dan menginginkan kerjasama dengan perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan akan dituntut untuk menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder* serta memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka, terutama *stakeholder* yang memiliki *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan (Chariri & Ghazali, 2007). Selain itu, akses politik dapat menjadi sumber kekuatan dalam pengambilan keputusan dan mengontrol organisasi, sehingga memberikan efek dalam pasar dan sistem kapitalisme untuk menambah kekayaan dan standar hidup yang tinggi (Jensen, 2002).

Perusahaan keluarga yang berhati-hati dalam mengakui labanya berbanding terbalik dengan efek dari koneksi politik yang justru meningkatkan laba perusahaan. Penelitian dari Chi dkk. (2019) yang mengambil data perusahaan di Taiwan tahun 1996 sampai 2012 menunjukkan adanya hubungan perusahaan keluarga dan pelaporan keuangan yang konservatif dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Peran moderasi yang dihasilkan oleh koneksi politik adalah melemahkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Ini mengartikan bahwa perusahaan keluarga yang terhubung secara politik cenderung tidak konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan. Perusahaan keluarga yang cenderung untuk menghindari konflik keagenan antara anggota keluarga dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih memilih untuk menerapkan konservatisme akuntansi. Jika perusahaan keluarga memiliki koneksi politik, maka justru akan menimbulkan masalah keagenan yang lebih parah sehingga pemegang saham minoritas mungkin meminta perusahaan keluarga untuk menyediakan mekanisme pemantauan yang lebih baik (Fan & Wong, 2005).

Di Indonesia, perusahaan keluarga lebih banyak terdapat pada sektor manufaktur. Hal tersebut yang menjadikan penelitian ini mengambil sampel di bidang manufaktur. Alasan lain penelitian ini menggunakan sektor manufaktur adalah dikarenakan industri manufaktur merupakan komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional, misalnya dapat meningkatkan nilai investasi dan ekspor. Kementrian Perindustrian (Kemenperin) juga menjelaskan bahwa adanya fenomena *Fourth Industrial Revolution* (4IR) atau yang disebut dengan Revolusi Industri 4.0 memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadi salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia. Industri manufaktur berkontribusi sebesar 20 persen PDB Indonesia dan membuka lebih dari 14 juta lapangan pekerjaan hingga tahun 2016. Tidak hanya itu, ekonomi Indonesia telah bertumbuh enam kali lipat dalam kurun waktu 17 tahun dan mencapai angka lebih dari US\$ 1 triliun pada tahun 2017 serta telah berhasil berubah dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi yang

berbasis sektor yang lebih bernilai tambah berkat belanja konsumen yang kuat dan berkontribusi hingga 50 persen dari PDB. Oleh karena itu, pemerintah semakin berupaya mengembangkan revolusi industri 4.0 manufaktur melalui pelaksanaan peta jalan *Making Indonesia 4.0*.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), industri manufaktur mengalami penurunan dari tahun tahun 2017 sampai dengan 2019 karena berkurangnya permintaan. Kemenperin juga mengemukakan bahwa, faktor lain yang menyebabkan menurunnya kontribusi industri manufaktur Indonesia karena adanya perubahan menuju ekonomi berbasis jasa. Penurunan ini terjadi sebesar 22% pada tahun 2016 setelah sebelumnya mencapai titik tertinggi sebesar 26% pada tahun 2001 dan diperkirakan akan terus melemah sampai pada tahun 2030 jika tidak dilakukan intervensi apapun. Namun, pada tahun 2030 populasi usia produktif diperkirakan akan bertambah sebanyak 30 juta orang. Hal tersebut membuat pemerintah sadar untuk harus membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat nantinya. Penerapan 4IR dapat membuka peluang untuk merevitalisasi kembali industri manufaktur yang ada di Indonesia, mendorong ekspor netto, meningkatkan produktifitas pekerja, dan membuka sekitar 10 juta lapangan pekerjaan tambahan yang akan menjadi landasan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk menuju 10 ekonomi terbesar di dunia.

Terdapat beberapa kesenjangan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian tentang konservatisme akuntansi lebih banyak dihubungkan dengan kepemilikan keluarga, kepemilikan terkonsentrasi, dan bisnis keluarga yang mana membahas tentang reaksi pasar daripada berfokus ke *accrued items* atau model akrual dan laba rugi. Hasil temuan oleh Chen dkk. (2014) mengutarakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Alves (2019) menampilkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Dalam hubungan bisnis keluarga, penelitian Fendiani dan Tandiono (2016) mengemukakan bahwa bisnis keluarga secara signifikan mempengaruhi tingkat

konservatisme akuntansi. Namun, Li dkk. (2015) berpendapat bahwa perusahaan yang dikendalikan negara di Hongkong lebih konservatif daripada perusahaan keluarga yang ada di negara tersebut. Yunos dkk. (2010) juga mengungkapkan konservatisme akuntansi menjadi tidak efektif bagi tata kelola perusahaan jika berada di bawah kendali pemegang saham mayoritas.

Kedua, penelitian yang menggunakan koneksi politik sebagai variabel moderasi rata-rata difokuskan pada hubungan perusahaan keluarga dan kinerja perusahaan. Salah satu hasil riset dari Harymawan dkk. (2019) menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan keluarga. Muttakin dkk. (2015) juga mengatakan bahwa kinerja perusahaan keluarga yang terhubung secara politik lebih baik daripada perusahaan keluarga yang tidak terhubung. Tidak hanya kinerja perusahaan, koneksi politik sebagai variabel moderasi juga banyak digunakan untuk penelitian pengaruh *corporate governance* terhadap konservatisme akuntansi. Mohammed dkk. (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa variabel moderasi koneksi politik berpengaruh negatif pada *corporate governance* dan konservatisme akuntansi. Penelitian tentang koneksi politik yang memoderasi perusahaan keluarga dan konservatisme belum banyak ditemukan. Namun, terdapat salah satu temuan dari Chi dkk. (2019) yang menghasilkan bahwa koneksi politik melemahkan hubungan perusahaan keluarga dan konservatisme akuntansi.

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan, variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yakni perusahaan keluarga (*family firm*), sedangkan variabel dependennya menggunakan konservatisme akuntansi. Untuk melihat hubungan antara perusahaan keluarga (*family firm*) dan konservatisme akuntansi, maka diperlukan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Terdapat juga beberapa variabel kontrol yang mendukung penelitian ini, yaitu *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan umur perusahaan. Mengacu pada variabel-variabel yang telah dijabarkan, maka temuan ini dimaksudkan untuk membuktikan dan menganalisis

adanya pengaruh perusahaan keluarga terhadap konservatisme akuntansi. Tujuan selanjutnya adalah membuktikan dan menganalisis peran koneksi politik pada pengaruh perusahaan keluarga terhadap konservatisme akuntansi.

Penggunaan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2019 dengan total yang terpilih sebanyak 397 observasi serta menggunakan pendekatan kuantitatif. Setelah dilakukannya proses penelitian, diperoleh hasil yang menyatakan bahwa perusahaan keluarga berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Terdapat pula peran moderasi koneksi politik pada pengaruh perusahaan keluarga terhadap konservatisme akuntansi. Variabel moderasi koneksi politik memberikan hasil negatif signifikan yang berarti melemahkan hubungan positif antara perusahaan keluarga dan konservatisme akuntansi. Perusahaan keluarga yang terkoneksi secara politik justru dianggap kurang konservatif dalam melakukan pelaporan akuntansinya. Bersumber pada hasil penelian yang telah dijelaskan, secara praktis riset ini dapat menjadi rujukan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi dan manajemen perusahaan keluarga dapat mengaplikasikan prinsip konservatisme akuntansi agar terbebas dari konflik keagenan dan masalah-masalah lain yang sering timbul di perusahaan.

Sistematika penulisan pada penelitian ini diklasifikasikan menjadi beberapa bab yang dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Adanya sistematika penulisan diharapkan agar dapat mempermudah dalam menyusun serta mempelajari rangkaian penelitian.